



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Kolonel Wahid Udin, Serasan Jaya, Sekayu, Sumatera Selatan 30711 Telepon
(0714) 324 1036, Pos-el Dp3a.muba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 800/02989 DPPPA/ 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin selaku OPD menyusun Renja-PD, Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/10/SK/DPPPA/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026.;
- bahwa untuk maksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Musi Banyuasin dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin ;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 273 tahun 2021 tentang susunan Organisasi uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin ;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/10/SK/DPPPA/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENYUSUNAN (RENCANA KERJA) RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pegawai yang nama-namanya ditetapkan dalam kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk menjadi tim penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tercantum dalam kolom 3 (tiga) daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran pertama bertugas: Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 menurut Tujuan, Kebijakan, dan Sasaran Program, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026

- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang di tuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Sekayu
Pada tanggal : 2 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Musi Banyuasin



H. Royland Aturi, SE., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19740822 200212 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : 800/02084/KPTS-DPPPA/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. Royland Aturi, S.E., M.Si	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Tim
2	Irfan, S.T	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
3	Endang Fitriyanti, S.PSi	Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak	Anggota
4	Rosita, SE.M.Si	Perencana Ahli Muda	Anggota
5	Halimah, S.H	Plt Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Asri Pramudyta, S.H	Analisis Kebijakan	Anggota
7	Qurratun Afifah, A.Md.Ak	Pengelola Progran dan Laporan	Anggota
8	Emilda, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota

Sekayu, 2 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Musi Banyuasin



H. Royland Aturi, SE., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19740822 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Kolonel Wahid Udin Serasan Jaya Sekayu Sumatera Selatan 30711
Telepon : (0714) 324 1036 , Pos-el dp3amuba@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : B-900/ 0299.1 / KPTS/DPPPA/ 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Renca Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 ,maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin selaku OPD menyusun Renja-PD ;
- b. bahwa untuk maksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 273 tahun 2021 tentang susunan Organisasi uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/10/SK/DPPPA/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sekayu
Pada tanggal : 26 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Musi Banyuasin


H. Royland Aturi, SE., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19740822 200212 1 001

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin merupakan SKPD baru, yang dahulu bergabung pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, menerima dan mengelola informasi dan melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin membuat tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan dari SKPD terdahulu, yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, bersifat indikatif dan menjadi landasan dalam pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025, dengan memperhatikan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026.

Kami menyadari dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Dalam pelaksanaan periode Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini apabila perlu untuk di komentari berbagai perubahan maka akan dilakukan revisi Rencana Kerja (Renja) Perubahan.

Tak lupa diucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan Renja ini, semoga dapat bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Renja ini Tahun 2025.

Sekayu, 2 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Musi Banyuasin

H. Royland Aturi, SE., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19740822 200212 1 001

DAFTAR ISI

SK TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025.....

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU 8

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perubahan Tahun Lalu dan Capaian
 Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak 17

 2.3. Realisasi Anggaran 20

 2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak.....26

 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27

 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....42

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PPPA, RENCANA KERJA PERUBAHAN
DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK..... 43

 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas PPPA Kab.Muba.....45

 3.2. Rencana Kerja (Renja)

 3.3. Program dan Kegiatan Dinas PPPA Kab. Muba

BAB IV PENUTUP 76

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Musi Banyuasin 2025 9

Tabel II. 2. Indeks Pemberdayaan Gender 2024 dan 2025.....17

Tabel II. 3. Indeks Pembangunan Gender 2024 dan 2025 18

Tabel II. 4. Rasio KDRT 2024 dan 2025 18

Tabel II. 5. Persentase Kecamatan Layak Anak 2024 dan 2025 19

Tabel II. 6. Rasio Kekerasan terhadap Anak 2024 19

Tabel II. 7. Anggaran Per program dan Kegiatan 2024.....20

Tabel II. 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....24

Tabel II. 9. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....28

Tabel II. 10. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 42

Tabel III. 1. Rencana Kerja Awal RKPD Tahun 2025.....44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja (RENJA) Perubahan PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi Kabupaten Musi Banyuasin melalui program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan Perangkat Daerah. RENJA Perubahan PD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 ini merupakan tahun pertama periode Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 2023 - 2026 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penyusunan rancangan awal RENJA Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan Perangkat Daerah terkait. Penyusunan Rancangan awal RENJA Perubahan ini juga berpedoman pada Renstra DPPPA, hasil evaluasi RENJA Perubahan DPPPA tahun lalu, dan hasil evaluasi RENJA Perubahan DPPPA tahun berjalan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal RENJA Perubahan DPPPA ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra DPPPA. Rancangan awal RENJA Perubahan Perangkat Daerah ini mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif,

lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan wajib non Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi enam sub urusan yaitu *peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak*. Selain itu juga melaksanakan komitmen dunia Sustainable Development Goals (SDGs) yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya MDGs (Milenium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh berbagai negara dan forum resolusi PBB yang memiliki 17 tujuan dimana beberapa tujuan dari SDGs yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah tujuan ke - 5 yaitu “ *Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan Anak*, tujuan ke -11 yaitu “ *membangun Kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan*” dan tujuan ke-16 yaitu “*mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi – institusi yang efektif, Akuntanbel di semua Level* dimana implementasinya terkait dengan kebijakan *Indonesia Layak Anak 2030, Provinsi Layak Anak 2022 dan Kabupaten Layak Anak*.

Selaras dengan tujuan tersebut, tujuan Pemberdayaan Perempuan adalah meningkatkan status dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kesetaraan dan keadilan dengan laki-laki dalam menerima manfaat pembangunan. Pemberdayaan perempuan juga sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik pertama dan utama bagi anak – anaknya dalam keluarga. Selain Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melaksanakan tugas menjamin Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menjadi motor penggerak dari *Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* dan upaya pemenuhan Hak anak yang dilaksanakan oleh berbagai PD yang terbagi atas lima klaster yaitu Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan, Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya, Dan Hak Perlindungan Khusus. Indikator keberhasilan dalam peningkatan Tumbuh Kembang Anak Dan Pemenuhan Hak Anak dapat dilihat dari indikator komposit kesejahteraan anak dan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Untuk kedua Hal tersebut Kabupaten Musi Banyuasin yang dimotori oleh DPPPA sebagai sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan sekretariat Pokja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) bersama para driver lainnya yaitu Bappeda, Inspektorat dan BPKAD serta Perangkat Daerah lainnya sebagai anggota Gugus Tugas KLA dan Pokja PUG telah mengantarkan Kabupaten Musi Banyuasin meraih 4 (empat) tahun berturut turut Penghargaan sebagai Kabupaten Menuju Layak Anak (2017,2018,2019 dan 2021) serta satu satunya Kabupaten di Sumatera Selatan yang mampu meraih Anugerah Parahita Eka Praya/Penghargaan APE karena dinilai oleh pemerintah melalui Kementrian PPPA RI telah mampu menerapkan Dasar dasar Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Pemulihan Korban dan Kerjasama Pemulihan Korban,
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunana Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pegasutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 273 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026, Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/10/SK/DPPPA/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 ;
20. Peraturan Bupati Musi banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimaksudkan untuk:

- a. Menjabarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 -2026 dikaitkan dengan hasil kajian isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025.

- b. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025.
- c. Mengukur kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- e. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah:

- a. sebagai acuan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan melalui Perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RKA;
- c. sebagai bahan penyusunan indikator evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya.
- d. sebagai bahan perumusan evaluasi implementasi kebijakan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. sebagai bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan capaian Perangkat Daerah dan pemerintah kabupaten.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Bayuasin Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 dan Capaian Rensta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Perangkat Daerah

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas PPPA, Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas PPPA

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas PPPA Kab.Muba

3.2. Rencana Kerja (Renja)

3.3. Program dan Kegiatan Dinas PPPA Kab. Muba

BAB IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk mendorong partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Dan Perlindungan Anak maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin sesuai kewenangannya telah melakukan upaya untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak sebagai bagian dari hak Asasi Manusia setiap warga negara dengan telah merumuskan berbagai kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengisyaratkan kepada kaum perempuan untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan serta terlindunginya hak - hak dasar anak dalam proses tumbuh kembangnya. Peningkatan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses pembangunan. Dinas Pemberdayaan Perempuan yang menjadi motor penggerak dari Upaya Kesenjangan Gender dan Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak melalui upaya penerapan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan dan Penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta menjadi motor penggerak dari upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak melalui penyelenggaraan Kebijakan Layak Anak (KLA pp). Pada Tahun 2020 telah merumuskan kebijakan yang Responsif Gender berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Tingginya komitmen Upaya Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak tersebut selain mendapat Apresiasi dari

Kementrian PPPA RI yaitu 4 (empat) tahun berturut - turut 2017,2018,2019 dan 2021.Di Tahun 2021

mendapat predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya dan meraih Anugerah Parahita Eka Praya Tingkat Madya karena dinilai telah mampu meletakkan dasar - dasar Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan telah memenuhi 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender, yaitu *Komitmen, Kebijakan Dan Program Yang Responsif Gender, Adanya Kelembagaan PUG, Sumber Daya,SDM Dan Sarana Prasarana, Data Terpilah, TOOL, Jejaring*. Di Tahun 2020 ini akan kembali dilakukan penilaian terhadap kualitas 7 Prasyarat tersebut bersama implementasinya yaitu Penerapan Analisis Gender pada indikator output kegiatan Perangkat Daerah. Untuk upaya tersebut telah dilakukan berbagai upaya diantara Penguatan Kelembagaan Pokja PUG melalui Advokasi, Pemberian Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan terakhir merupakan langkah inovatif yaitu Penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Penguatan Kelembagaan PUG dan Penerapan PPRG antara Bupati Musi Banyuasin dengan Perangkat Daerah dan Camat. Apresiasi didapat juga dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dimana saat penilaian Peduli Ham, score capaian untuk Upaya Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak mencapai 100 %. Hal ini membuktikan bahwa Dinas PPPA telah mampu menjadi motor penggerak sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin bersama para driver lainnya yaitu BAPPEDA, Inspektorat dan BPKAD serta Para Perangkat Daerah terkait.

Untuk melihat lebih jelas tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perubahan dan pencapaian Renstra Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat di lihat Tabel 2.1.2 (T.C.29) berikut:

Tabel II. 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Musi Banyuasin 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	08				URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Perencanaan,Penggaran,dan Evaluasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerj dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Perencanaan,Penggaran,dan Evaluasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	08	01	2.02		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%				100%	100%	100%	100%

2	08	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	08	01	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	2 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	100%
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	18 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%	20 Jenis	20 Jenis	100%
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Unit	36 unit	-	-	100%	22 Unit	22 Unit	100%
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	20 Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis Peralatan Rumah Tangga	100%	20 Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis Peralatan Rumah Tangga	100%
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	44 Jenis ATK	47 Jenis ATK	44 Jenis ATK	44 Jenis ATK	100%	44 Jenis ATK	44 Jenis ATK	100%
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan tersedianya barang	7 Jenis cetakan, 45500	10 Jenis Cetakan, 70300	7 Jenis cetakan, 45500	7 Jenis cetakan, 45500	100%	7 Jenis cetakan, 45500	7 Jenis cetakan, 45500	100%

						cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	pengadaa n	Pengadaan	pengadaan	pengadaan		pengadaan	pengadaan	
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	248 eksemplar , 3 jenis	248 eksemplar , 3 jenis	248 eksemplar , 3 jenis	248 eksemplar , 3 jenis	100%	248 eksemplar , 3 jenis	248 eksemplar , 3 jenis	100%
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu Dinas	100%	4 jenis	4 jenis	4 Jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanakan pembangunan gedung baru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebeluer	tersedianya Mebel kantor	1 unit	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1240 m	1240 m	1240 m	1240 m	100%	1240 m	1240 m	100%
2	08	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21 unit AC	21 unit AC	21 unit AC	21 unit AC	100%	21 unit AC	21 unit AC	100%
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Meningkatnya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	02	2.01	03	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perencana PD yang mendapat Pelatihan PPRGG	- 150 Orang Perencana di PD - 4 kali - 48 PD	150 Orang Perencana di PD - 4 kali - 48 PD	- 150 Orang Perencana di PD - 4 kali - 48 PD	- 150 Orang Perencana di PD - 4 kali - 48 PD	100%	- 150 Orang Perencana di PD - 4 kali - 48 PD	- 150 Orang Perencana di PD - 4 kali - 48 PD	100%

						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota								
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang, Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Perempuan, Pelatihan Perempuan dalam Politik, Pelatihan Perempuan dalam Ekonomi Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu.	100 Orang Peserta Pelatihan	100 Orang Peserta Pelatihan	100 Orang Peserta Pelatihan	100 Orang Peserta Pelatihan	100%	100 Orang Peserta Pelatihan	100 Orang Peserta Pelatihan	100%
2	08	02	2.02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Budaya.	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatkan Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatkan Peran Serta Perempuan melalui Organisasi Masyarakat	6 kegiatan, 7 ormas perempuan	6 kegiatan, 7 ormas perempuan	6 kegiatan, 7 ormas perempuan	6 kegiatan, 7 ormas perempuan	100%	6 kegiatan, 7 ormas perempuan	6 kegiatan, 7 ormas perempuan	100%
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT perempuan	0,70%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dan bantuan hukum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan operasional Layanan Pengaduan bagi perempuan korban kekerasan Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Regulasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	0,70%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pengembangan lembaga pusat pembelajaran keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan organisasi penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelatihan Parenting , 100 Orang Terlaksananya Pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P)	Kegiata 400 Orang Pelatiahah n Parenting , 100 Orang Pelatihan 2P	Kegiata 400 Orang Pelatiahah Parenting, 100 Orang Pelatihan 2P	3 Kegiata 400 Orang Pelatiahah Parenting, 100 Orang Pelatihan 2P	Kegiata 400 Orang Pelatiahah Parenting, 100 Orang Pelatihan 2P	100%	Kegiata 400 Orang Pelatiahah Parenting, 100 Orang Pelatihan 2P	Kegiata 400 Orang Pelatiahah Parenting, 100 Orang Pelatihan 2P	100%
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Data Gender dan Anak dalam bentuk data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan umur	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya PUHA Layanan Pemerintah dan Dunia Usaha	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Meperingati Kegiatan HAN Tk. Kabupaten terlaksananya pelatihan KHA terlaksananya Sosialisasi Perd dan Perbup	2 jenis kegiatan 100 orang pelatihan KHA, 100 orang peserta lomba	2 jenis kegiatan 100 orang pelatihan KHA, 100 orang peserta lomba	2 jenis kegiatan 100 orang pelatihan KHA, 100 orang peserta lomba	2 jenis kegiatan 100 orang pelatihan KHA, 100 orang peserta lomba	100%	2 jenis kegiatan 100 orang pelatihan KHA, 100 orang peserta lomba	2 jenis kegiatan 100 orang pelatihan KHA, 100 orang peserta lomba	100 %
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Khusus Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	07	2.02		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Ka/Kota	Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	07	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Operasional KPAD untuk melaksanakan upaya Perlindungan Khusus Anak termasuk pelaksanaan Dampingan Anak berhadapan dengan Hukum Terlaksananya advokasi kebijakan dan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

						pendampingan pelaksanaan kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan abupaten/kota								
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional UPT/Bidang PPA untuk layanan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100%	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai 5 (lima) sasaran, yaitu :

- 1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga.
- 2. Menyiapan Pengumpulan,Pengelolaan, Analisis dan Penyediaan data gender dan anak
- 3. Menningkatnya upaya pemenuhan hak anak melalui penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA).
- 4. Meningkatnya upaya pemenuhan Perlindungan Khusus sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 ayat 1 tentang Perlindungan Anak.
- 5. Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 dengan Realisasinya.

Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender

Tabel II. 2. Indeks Pemberdayaan Gender 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	2023	66,50	60,35	90,75
		2024	66,8	61,78	92,5

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam program Pengarusutamaan Gender.

Sasaran 2 : Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	2023	83,00	83,23	100,27
		2024	83,00	83,23	100,27

Tabel II. 3. Indeks Pembangunan Gender 2023 dan 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan dengan kriteria yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). yaitu *Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Riil*. namun data disajikan terpisah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Sasaran 3 : Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tabel II. 4. Rasio KDRT 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
1. Rasio KDRT	%	2023	0,09	0,0100	11,11
		2024	0,009	0,0032	35,5

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berbagai Upaya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan bersama Tim interdis seperti Polres, Pengadilan Agama, Dinas Sosial, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lapas, RSUD dan lain lain dengan cara melaksanakan Penyuluhan dan Pelatihan Peniadaan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A), Pembentukan Satgas PATBM, Sosialisasi Pemantapan Responsif Gender, Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT.

Menghadirkan Motivator anak dan Perempuan antara lain Dr. Aisyah Dahlan, Louis Sastrawijaya, dr. Setto Mulyadi untuk Pencegahan Narkoba, Pernikahan Dini, KDRT, dan Parenting, Kinerja lain penyiapan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Hak Perempuan dan Hak Anak dan Penandatanganan MOU antara Bupati Musi Banyuasin dengan Instansi Vertikal yaitu LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan Sekayu) Pengadilan Agama Sekayu, Polres Musi Banyuasin, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Yayasan Care Peduli. Upaya tersebut telah membuka pandangan masyarakat bahwa kekerasan pada anak dan perempuan bukan lagi Ranah Privat yang harus ditutupi namun sudah menjadi Ranah Publik yang harus dilaporkan apabila terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Sasaran 4 : *Meningkatkan pemenuhan Hak Anak*

Tabel II. 5. Persentase Kecamatan Layak Anak 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
1. Persentase Kecamatan Layak Anak	%	2023	53,34	60	112,48
		2024	100	100	100

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi telah diatur dalam Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk percepatan upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak maka Seluruh Kecamatan sudah melaksanakan Deklarasi untuk mewujudkan 15 Kecamatan Layak Anak yang mendukung Kabupaten Layak Anak.

Komitmen itu diikuti oleh Desa dan Kelurahan yang telah mendeklarasikan untuk menjadi Desa atau Kelurahan Layak Anak di kecamatan masing masing dalam rangka menuju Kecamatan Layak Anak/Desa Layak Anak. Target untuk tahun 2024 sebesar 6 dari 15 kecamatan, realisasi tahun 2023 adalah 100%, dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah berupaya memenuhi indikator kecamatan layak anak.

Sasaran 5: *Meningkatkan Upaya PUHA dan Perlindungan Khusus Anak*

Tabel II. 6. Rasio Kekerasan terhadap Anak 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
Rasio Kekerasan terhadap Anak	%	2024	100	100	100

Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak membuka layanan psikologi untuk memberikan konseling dan juga psikoterapi untuk anak-anak dan perempuan korban kekerasan, serta anak dan remaja yang memiliki gangguan emosi maupun perilaku. Layanan ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun.

2.3. Realisasi Anggaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 9.260.533.067,00** dengan rincian alokasi dan realisai Per program sebagai berikut :

Tabel II. 7. Anggaran Per program dan Kegiatan 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	6.367.392.817,00	5.517.438.075,00	86,65
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.592.000,00	63.189.000,00	97,83
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.720.000,00	43.659.000,00	97,63
2.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	19.872.000,00	19.530.000,00	98,28
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.120.542.666,00	3.429.570.793,00	83,23
1.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	4.120.542.666,00	3.429.570.793,00	83,23
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.500.000,00	52.500.000,00	49,76
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.250.000,00	21.250.000,00	100,00
2.	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	84.250.000,00	31.250.000,00	37,09
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.114.998.715,00	1.037.251.068,00	93,03
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	19.982.920,00	18.882.500,00	94,49
2.	Penyediaan Peralatan Dan	233.847.100,00	233.327.000,00	99,78

	Perlengkapan Kantor			
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.996.295,00	45.041.545,00	90,09
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.808.400,00	252.881.750,00	96,59
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	99.997.600,00	100,00
6.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	24.960.000,00	24.960.000,00	100,00
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	2.845.000,00	7,11
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	384.404.000,00	359.315.673,00	93,47
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.599.800,00	138.733.400,00	99,38
1.	Pengadaan Mebel	139.599.800,00	138.733.400,00	99,38
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.507.636,00	443.861.087,00	96,39
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	78.601.236,00	74.254.690,00	94,47
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	381.906.400,00	369.606.397,00	96,78
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.652.000,00	352.332.727,00	97,42
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	183.400.000,00	174.167.727,00	94,97
2.	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	145.922.000,00	145.840.000,00	99,94
3.	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	32.330.000,00	32.325.000,00	99,98
II.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.034.800.100,00	977.881.498,00	94,50
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota	342.220.000,00	329.888.669,00	96,40
1.	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pug Termasuk Pprg	342.220.000,00	329.888.669,00	96,40
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	692.580.100,00	647.992.829,00	93,56

	Kabupaten/kota			
1.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	206.280.000,00	188.750.829,00	91,50
2.	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	486.300.100,00	459.242.000,00	94,44
III.	Program Perlindungan Perempuan	214.656.400,00	199.868.200,00	93,11
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota	214.656.400,00	199.868.200,00	93,11
1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota	214.656.400,00	199.868.200,00	93,11
IV.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	138.233.600,00	115.847.921,00	83,81
	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/kota	138.233.600,00	115.847.921,00	83,81
1.	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/kota	138.233.600,00	115.847.921,00	83,81
V	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	99.999.950,00	0,00	0,00
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	99.999.950,00	0,00	0,00
1.	Penyajian Dan Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Kewenangan Kabupaten/kota	99.999.950,00	0,00	0,00
VI	Program Pemenuhan Hak Anak (pha)	356.037.400,00	197.517.387,00	55,48
	Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	356.037.400,00	197.517.387,00	55,48
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan	106.037.400,00	0,00	0,00

	Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/kota	250.000.000,00	197.517.387,00	79,01
VII	Program Perlindungan Khusus Anak	1.049.412.800,00	784.255.856,00	74,73
	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota</i>	811.270.000,00	608.318.205,00	74,98
1.	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/kota	811.270.000,00	608.318.205,00	74,98
	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/kota	238.142.800,00	175.937.651,00	73,88
1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota	238.142.800,00	175.937.651,00	73,88

Dari **tabel 2.2** diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 berupa capaian keuangan sudah mencapai 84,15 %, berdasarkan standar penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dikategorikan sudah tercapai.

Tabel II. 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)												
	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	83,00	83,05	83,10	83,15	82,63	83,78	83,10	83,15	Data profil gender dari BPS Pusat dan Kementerian PPPA RI
	2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	66,50	66,55	66,56	66,57	59,97	65,65	66,56	66,57	Data profil gender dari BPS Pusat dan Kementerian PPPA RI
	3	Rasio KDRT	-	-	0,009 %	0,010 %	0,011 %	0,012%	0,0067	0,010%	0,011 %	0,012%	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak												

	1	Upaya PD Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)/Penghargaan KLA	-	-	6	7	7	8	0	-	7	8	Bidang Tumnuh Kembang Anak
			-	-	53,34%	66,66%	66,66%	73,33%	60	7	66,66 %	73,33%	Bidang Tumbuh Kembang Anak
	2	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	-	-	0,013 %	0,014 %	0,015 %	0,016%	0,023%	0,014%	0,015 %	0,016%	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Masih tingginya Kesenjangan Ekonomi Perempuan

Bila dilihat dari sumbangan pendapatan yang diwakili oleh pengeluaran perkapita. Nilai pengeluaran perkapita perempuan tahun 2024 untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 5.896 juta sangat timpang dibandingkan dengan pengeluaran perkapita laki-laki sebesar 17,448. Permasalahan utama yang dihadapi yaitu masih tingginya kesenjangan ekonomi perempuan, yang disebabkan kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, akses yang belum optimal terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi pasar, kredit, dan modal kerja. Tingkat pengangguran pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki serta besaran upah/gaji yang diterima penduduk perempuan khususnya di sektor non-pertanian lebih kecil dibanding laki-laki. Sumbangan pendapatan perempuan Pada Tahun 2024 sebesar 34,81%. Ini berarti terjadi kesenjangan yang besar antara pendapatan laki - laki dan perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Masih Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Legislatif dan Eksekutif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan mengamanatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, Kurang Lebih namun kenyataannya peran dan posisi perempuan di bidang politik masih rendah Pada Pemilihan legislatif Tahun 2024 persentase anggota perempuan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin hanya sebesar 11,11% Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan yang memiliki ketertarikan dan berpartisipasi di politik serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih wakil perempuan di lembaga legislatif.

1. Masih Rendahnya Implementasi Pengarusutamaan Gender

Berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender antara lain:

- 1) Masih rendahnya pemahaman serta komitmen Para pemegang kebijakan dan PD pelaksana dalam mengimplementasikan PPRG;
- 2) Belum semua PD mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan jangka menengah ;
- 3) Belum semua PD memiliki kebijakan tentang pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender ;
- 4) Kurangnya kompetensi perencana PD yang mengerti tentang PUG;
- 5) Anggapan tidak pentingnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi PD ;
- 6) Belum tersedianya data terpilah gender yang akurat ;
- 7) Masih belum optimalnya kinerja Pokja PUG dan Focal Point.

2. Permasalahan Bidang Tumbuh Kembang Anak

1. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak - Hak Anak
 - a. Upaya pemenuhan hak anak terus dilakukan dengan mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Musi Banyuasin,
 - b. Tingginya kematian pada bayi dan balita ;
 - c. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari masih adanya anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
2. Belum semua Puskesmas mendapat predikat ramah anak.
3. Belum semua fasilitas pendidikan (sekolah) di Musi Banyuasin yang ramah anak.
4. Belum seluruh fasilitas umum memiliki ruang laktasi.
5. Belum tersedianya data terpilah sistem Informasi anak yang akurat.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada table 2.4 pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal renja perubahan, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan.

Namun untuk program dan kegiatan yang seharusnya ada tidak bisa terlaksana berhubung flapond anggaran yang terdapat dalam KUA PPAS tidak mencukupi.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel II. 9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaiap	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Sekayu	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100%	11.495.255.106	PROGRAM ENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Sekayu	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100%	11.495.255.106	
I	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekayu		100%	64.592.400	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekayu		100%	64.592.400	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekayu	Tersusunnya Laporan Perencanaan,Pe nggaran,dan Evaluasi Kinerja SKPD	3 Laporan	44,720,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekayu	Tersusunnya Laporan Perencanaan,P enggaran,dan Evaluasi Kinerja SKPD	3 Laporan	44,720,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerj dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekayu	Tersusunnya Laporan Perencanaan,Pe nggaran,dan Evaluasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.703.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerj dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekayu	Tersusunnya Laporan Perencanaan,P enggaran,dan Evaluasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.703.000	

II	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.344.056.756	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.344.056.756	
1	Penyediaa Gaji dan Tunjangan ASN	Sekayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.344.056.756	Penyediaa Gaji dan Tunjangan ASN	Sekayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.344.056.756	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat	100%	122.940.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat	100%	122.940.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekayu	tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	100%	23.460.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekayu	tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	100%	23.460.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekayu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	99.480.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekayu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	99.480.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.014.433.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.014.433.950	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Sekayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	20 Jenis	19.915.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Sekayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Tersedianya Komponen	20 Jenis	19.915.250	

			Disediakan, Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor					Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 unit	204.091.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 unit	204.091.800	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekayu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	25 Jenis	70.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekayu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	25 Jenis	70.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	45 Jenis ATK	220.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	45 Jenis ATK	220.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Sekayu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis cetakan, 45500 pengadaan	99.098.900	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Sekayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Jenis cetakan, 45500 pengadaa n	99.098.900	

6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Sekayu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	248 eksemplar , 3 jenis	24.960.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Sekayu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	248 eksemplr , 3 jenis	24.960.000	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekayu	Tersedianya Makan Minum Tamu Dinas	100%	49.114.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekayu	Tersedianya Makan Minum Tamu Dinas	100%	49.114.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	327.254.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Kab.Muba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	327.254.000	
v	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekayu	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	534.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekayu	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	534.000.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Sekayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	114.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Sekayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	114.000.000	

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Orang	420.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekayu	Bayar Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	16 Orang	420.000.000	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekayu	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100%	366.626.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekayu	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100%	366.626.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Sekayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	227.375.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Sekayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	227.375.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1240 m	139.251.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1240 m	139.251.000	

3	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Sekayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23 unit AC	32.330.000	Pemeliharaan/Rehabilit as Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Sekayu	umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23 unit AC	32.330.000	
2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Sekayu	Persentase Pengarusutama an Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	908.000.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Sekayu	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		913.000.000	

I	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	Sekayu	Meningkatnya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah	100%	190.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah	100%	190.000.000	
	1 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sekayu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perencana PD yang mendapat Pelatihan PPRGG Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	48 Perangkat Daerah	190.000.000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sekayu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perencana PD yang mendapat Pelatihan PPRGG Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	48 Perangkat Daerah	190.000.000	

II	Pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan	100%	718.000.000	Pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemausyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan	100%	723.000.000	
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sekayu	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Perempuan, Pelatihan Perempuan dalam Politik, Pelatihan Perempuan Dalam Ekonomi Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu.	5 Kegiatan	176.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sekayu	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Perempuan, Pelatihan Perempuan dalam Politik, Pelatihan Perempuan Dalam Ekonomi Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu	3 Kegiatan	178.000.000	
2	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum, Sosial dan Budaya.	Sekayu	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatkan	7 ormas perempuan	542.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum, Sosial dan Budaya.	Sekayu	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatkan Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	7 ormas perempuan	545.000.000	

			Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Patisipasi Perempuan dalam Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatkan Peran Serta Perempuan melalui Organisasi Masyarakat					Perempuan dalam Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatkan Peran Serta Perempuan melalui Organisasi Masyarakat			
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Sekayu	Rasio KDRT perempuan	0,70%	466.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Sekayu	Persentase Perlindungan Perempuan	0,70%	469.000.000	
I	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan	100%	213.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan	100%	215.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan ,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan ,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	98.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan ,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan ,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.000.000	

2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Perangkat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	115.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Perangkat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	116.000.000	
II	Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dan bantuan hukum.	100 %	253.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dan bantuan hukum.	100%	254.000.000	
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan operasional Layanan Pengaduan bagi perempuan korban kekerasan Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota	100 %	253.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan operasional Layanan Pengaduan bagi perempuan korban kekerasan Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota	100 %	254.000.000	

4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Sekayu	Regulasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	100%	155.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Sekayu	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	156.000.000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Sekayu	Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	155.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Sekayu	Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	156.000.000	
1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	155.000.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Kabupaten/Kota	100%	156.000.000	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Sekayu	Persentase data gender dan anak	100%	182.606.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Sekayu	Persentase data gender dan anak	100%	185.000.000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	tersedianya Data Gender dan Anak dalam bentuk data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan umur	100%	182.606.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	tersedianya Data Gender dan Anak dalam bentuk data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan umur	100%	185.000.000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Terlaksananya penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	182.606.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Terlaksananya penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	185.000.000	

6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Sekayu	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	100%	889.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PUHA)	Sekayu	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	100%	914.000.000	
I	Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewengan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya PUHA Layanan Pemerintah dan Dunia Usaha	100%	345.000.000	Pelebagaan PUHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewengan Kab /Kota	Sekayu	Meningkatnya PUHA Layanan Pemerintah dan Dunia Usaha	100%	346.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Meperingati Kegiatan HAN Tk. Kabupaten terlaksananya pelatihan KHA terlaksananya Sosialisasi Perd dan Perbup	500 orang 4 jenis 1 kegiatan 100 orang 200 orangDunia Usaha.	345.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Meperingati Kegiatan HAN Tk. Kabupaten terlaksananya pelatihan KHA terlaksananya Sosialisasi Perd dan Perbup.	500 orang 4 jenis 1 kegiatan 100 orang 200 orangDunia Usaha.	346.000.000	
II	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewengan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewengan Kab/Kota	100%	544.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewengan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewengan Kab/Kota	100%	568.000.000	

1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Paket SBRA, 7 kecamatan	159.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	SPekayu	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Paket SBRA, 7 kecamatan	158.000.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	230.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	250.000.000	
3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	155.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	160.000.000	
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Sekayu	Persentase Perlindungan Khusus Anak	100%	1.448.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Sekayu	Persentase Perlindungan Khusus Anak	100%	1.449.000.000	
I	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak	100%	1.182.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak	100%	1.182.000.000	

I	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Sekayu	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	3 Dokumen	1.182.000.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Sekayu	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kabupaten/ kota	3 Dokumen	1.182.000.000	
II	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	tersedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	266.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	tersedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	267.000.000	
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 orang	266.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 bulan 15 kecamatan	267.000.000	

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari tiap-tiap bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bagian dari kegiatan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel II. 10. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1.1 Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Adalah Suatu Kondisi yang Akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Lima Tahun,. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah /perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan dan Tujuan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Adalah : **MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

3.1.1 Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin. Setiap Program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait suatu dengan yang lainnya. Adapun program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No		P-Renja							
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Ket.
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Terlembaganya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada perangkat daerah dan meningkatnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada ORMAS	30 PD	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Terlembaganya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada perangkat daerah dan meningkatnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada ORMAS	30 PD	
			Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penyediaan layanan bagi perempuan korban	0,011 %			Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penyediaan layanan bagi perempuan korban	0,011 %	
			Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	1			Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	1	
			Penguatan dan penyediaan layanan kualitas keluarga (PUSPAGA)	3			Penguatan dan penyediaan layanan kualitas keluarga (PUSPAGA)	3	
			Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan data gender dan anak	1			Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan data gender dan anak	1	
	Meningkatnya Kaulitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Melembagakan pemenuhan hak anak (PUHA) di PD, DU, LM dan MM melalui kebijakan kabupaten layak anak (KLA)	86,66	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Melembagakan pemenuhan hak anak (PUHA) di PD, DU, LM dan MM melalui kebijakan kabupaten layak anak (KLA)	86,66	
			Menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	4			Menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	4	
			Pencegahan kekerasan, penguatan layanan, penguatan lembaga penyedia bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	0,015			Pencegahan kekerasan, penguatan layanan, penguatan lembaga penyedia bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	0,015	
			Indeks kepuasan masyarakat	100			Indeks kepuasan masyarakat	100	

Tabel III. 1. Rencana Kerja Perubahan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaiap	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Sekayu	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100%	7.446.649.106	PROGRAM ENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Sekayu	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100%	7.446.649.106	
I	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekayu		100%	64.592.400	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekayu		100%	64.592.400	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekayu	Tersusunnya Laporan Perencanaan,Penggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD	3 Laporan	44,720,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekayu	Tersusunnya Laporan Perencanaan,Peng garan,dan Evaluasi Kinerja SKPD	3 Laporan	44,720,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerj dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekayu	Tersusunnya Laporan Perencanaan,Penggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.703.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerj dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekayu	Tersusunnya Laporan Perencanaan,Peng garan,dan Evaluasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.703.000	

II	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.344.056.756	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.344.056.756	
1	Penyediaa Gaji dan Tunjangan ASN	Sekayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.344.056.756	Penyediaa Gaji dan Tunjangan ASN	Sekayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.344.056.756	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat	100%	122.940.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat	100%	122.940.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekayu	tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	100%	23.460.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekayu	tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	100%	23.460.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekayu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	99.480.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekayu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	99.480.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.014.433.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.014.433.950	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Sekayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	20 Jenis	19.915.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Sekayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang	20 Jenis	19.915.250	

			Disediakan, Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Bangunan		Disediakan, Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 unit	204.091.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 unit	204.091.800	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekayu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	25 Jenis	70.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekayu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	25 Jenis	70.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	45 Jenis ATK	220.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	45 Jenis ATK	220.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Sekayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Jenis cetakan, 45500 pengadaa n	99.098.900	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Sekayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Jenis cetakan, 45500 pengadaa n	99.098.900	

6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Sekayu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	248 eksemplar , 3 jenis	24.960.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Sekayu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	248 eksemplar , 3 jenis	24.960.000	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekayu	Tersedianya Makan Minum Tamu Dinas	100%	49.114.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekayu	Tersedianya Makan Minum Tamu Dinas	100%	49.114.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	327.254.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	327.254.000	
v	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekayu	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	534.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekayu	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	534.000.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Sekayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	114.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Sekayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	114.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Orang	420.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekayu	Bayar Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	16 Orang	420.000.000	

VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekayu	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100%	366.626.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekayu	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100%	366.626.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Sekayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	227.375.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Sekayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	227.375.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1240 m	139.251.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1240 m	139.251.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Sekayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23 unit AC	32.330.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Sekayu	umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23 unit AC	32.330.000	

2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Sekayu	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	908.000.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Sekayu	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		913.000.000	
I	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	Sekayu	Meningkatnya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah	100%	190.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah	100%	190.000.000	
1	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sekayu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perencana PD yang mendapat Pelatihan PPRGG Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	48 Perangkat Daerah	190.000.000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sekayu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perencana PD yang mendapat Pelatihan PPRGG Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	48 Perangkat Daerah	190.000.000	
II	Pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan	100%	718.000.000	Pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemaasyarakat Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan	100%	723.000.000	

1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sekayu	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Perempuan, Pelatihan Perempuan dalam Politik, Pelatihan Perempuan Dalam Ekonomi Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu.	5 Kegiatan	176.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sekayu	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Perempuan, Pelatihan Perempuan dalam Politik, Pelatihan Perempuan Dalam Ekonomi Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu	3 Kegiatan	178.000.000	
2	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Budaya.	Sekayu	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatkan Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatkan Peran Serta Perempuan melalui Organisasi Masyarakat	7 ormas perempuan	542.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Budaya.	Sekayu	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatkan Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatkan Peran Serta Perempuan melalui Organisasi Masyarakat	7 ormas perempuan	545.000.000	
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Sekayu	Rasio KDRT perempuan	0,70%	466.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Sekayu	Persentase Perlindungan Perempuan	0,70%	469.000.000	

I	Pencegahan Kekersan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan	100%	213.000.000	Pencegahan Kekersan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan	100%	215.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan ,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan ,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	98.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan ,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan ,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.000.000	
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Perangkat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	115.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Perangkat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	116.000.000	
II	Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dan bantuan hukum.	100 %	253.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dan bantuan hukum.	100%	254.000.000	
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan operasional Layanan Pengaduan bagi perempuan korban kekerasan Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota	100 %	253.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan operasional Layanan Pengaduan bagi perempuan korban kekerasan Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota	100 %	254.000.000	

4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Sekayu	Regulasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	100%	155.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Sekayu	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	156.000.000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Sekayu	Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	155.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Sekayu	Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	156.000.000	
1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	155.000.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Kabupaten/Kota	100%	156.000.000	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Sekayu	Persentase data gender dan anak	100%	182.606.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Sekayu	Persentase data gender dan anak	100%	185.000.000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	tersedianya Data Gender dan Anak dalam bentuk data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan umur	100%	182.606.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	tersedianya Data Gender dan Anak dalam bentuk data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan umur	100%	185.000.000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Terlaksananya penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	182.606.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Terlaksananya penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	185.000.000	
6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Sekayu	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	100%	889.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PUHA)	Sekayu	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	100%	914.000.000	

I	Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewengan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya PUHA Layanan Pemerintah dan Dunia Usaha	100%	345.000.000	Pelebagaan PUHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewengan Kab /Kota	Sekayu	Meningkatnya PUHA Layanan Pemerintah dan Dunia Usaha	100%	346.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Meperingati Kegiatan HAN Tk. Kabupaten terlaksananya pelatihan KHA terlaksananya Sosialisasi Perd dan Perbup	500 orang 4 jenis 1 kegiatan 100 orang 200 orangDunia Usaha.	345.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Meperingati Kegiatan HAN Tk. Kabupaten terlaksananya pelatihan KHA terlaksananya Sosialisasi Perd dan Perbup.	500 orang 4 jenis 1 kegiatan 100 orang 200 orangDunia Usaha.	346.000.000	
II	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewengan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewengan Kab/Kota	100%	544.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewengan Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewengan Kab/Kota	100%	568.000.000	
1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Paket SBRA, 7 kecamatan	159.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Sekayu	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Paket SBRA, 7 kecamatan	158.000.000	

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	230.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	250.000.000	
3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	155.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	160.000.000	
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Sekayu	Persentase Perlindungan Khusus Anak	100%	1.266.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Sekayu	Persentase Perlindungan Khusus Anak	100%	1.267.000.000	
I	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekayu	Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak	100%	1.182.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Sekayu	Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak	100%	1.182.000.000	
I	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Sekayu	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	3 Dokumen	1.000.000.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Sekayu	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kabupaten/ kota	3 Dokumen	1.000.000.000	
II	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Sekayu	tersedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	266.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Sekayu	tersedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	267.000.000	

	Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 orang	266.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekayu	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 bulan 15 kecamatan	267.000.000	

Tabel III. 2 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						9.253.150.192,00							9.934.037.057,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.253.150.192,00							9.934.037.057,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						9.253.150.192,00							9.934.037.057,00	
1,	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	-			100 %	5.716.364.356,00						-	6.079.531.677,00	

	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	63.077.800,00			-	-	Pegawai Dinas PPPA (ASN dan Non ASN)	-	64.858.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	44.374.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Pegawai Dinas PPPA (ASN dan Non ASN)		44.944.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	18.703.800,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA (ASN dan Non ASN)		19.914.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Pada Perangkat Daerah (PD)</i>	-			100 %	3.830.422.476,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas PPPA	-	4.036.040.641,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	3.830.422.476,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas PPPA		4.036.040.641,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (PD)</i>	-			100 %	122.940.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas PPPA	-	121.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	23.460.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas PPPA		21.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	99.480.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas PPPA		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (PD)	-			100 %	873.512.124,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA	-	1.029.337.830,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	19.915.250,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transforma si Digital Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		19.936.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	144.091.800,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		144.454.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	40.276.620,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Pegawai Dinas PPPA		49.987.630,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	199.646.554,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	99.098.900,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transforma si Digital Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.06.0007		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	24.960.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transforma si Digital Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		00,0024.960.0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	49.114.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transforma si Digital Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		00,00	70.000.0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	39.155.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transforma si Digital Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		00,00	40.000.0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	257.254.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah pada PD</i>	-			100 %	471.430.956,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA	-	471.716.836,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	45.010.956,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		41.716.836,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	426.420.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transforma si Digital Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		430.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Penunjang Urusan DPPPA	-			100 %	354.981.000,00			-	-	Pegawai Dinas PPPA	-	355.702.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	183.400.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	Pegawai Dinas PPPA		183.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	139.251.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		139.362.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	32.330.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Dinas PPPA		32.940.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2,	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG	-			66,8 Indeks 28 Jumlah	1.132.187.200,00						-	1.129.373.000,00	

	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Jumlah PD yang menerapkan PUG melalui PPRG	-			100 %	416.145.600,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah Wilayah Kab. Muba, 15 Kecamatan di Kab. Muba, Perusahaan, Lembaga/Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat, Perempuan, Perempuan Kepala Keluarga,	-	407.853.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Perangkat Daerah	227.538.600,00	- Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah Wilayah Kab. Muba, 15 Kecamatan di Kab. Muba, Perusahaan, Lembaga/Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat, Perempuan, Perempuan Kepala Keluarga,		229.853.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				48 Perangkat Daerah	188.607.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Musi Banyuasin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah Wilayah Kab. Muba, 15 Kecamatan di Kab. Muba, Perusahaan, Lembaga/Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat, Perempuan, Perempuan Kepala Keluarga,		178.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>MeningkatnyaPemb erday aan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</i>	-			100 %	716.041.600,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah Terkait, PKK Kab. Muba, DWP Kab. Muba,Wirausaha Perempuan,15 Kecamatan di Kab. Muba, Perusahaan, Lembaga/Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat, Perempuan, Perempuan Kepala Keluarga,	-	721.520.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				5 Dokumen	175.510.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah Terkait, PKK Kab. Muba, DWP Kab. Muba,Wirausaha Perempuan,15 Kecamatan di Kab. Muba, Perusahaan, Lembaga/Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat, Perempuan, Perempuan Kepala Keluarga,		175.520.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Organisasi	540.531.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah Terkait, PKK Kab. Muba, DWP Kab. Muba,Wirausaha Perempuan, 15 Kecamatan di Kab. Muba, Perusahaan, Lembaga/Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat, Perempuan, Perempuan Kepala Keluarga,		546.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-			100 %	594.560.940,00						-	709.611.380,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Persentase Kekerasan terhadap Perempuan	-			100 %	210.872.600,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perempuan Ruang Lingkup Kabupaten Musi Banyuasin, Perempuan Rentan, Perempuan korban KDRT,	-	245.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	96.552.500,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perempuan Ruang Lingkup Kabupaten Musi Banyuasin, Perempuan Rentan, Perempuan korban KDRT,		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Perangkat Daerah	114.320.100,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perempuan Ruang Lingkup Kabupaten Musi Banyuasin, Perempuan Rentan, Perempuan korban KDRT,		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya layanan Perlindungan lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	-			100 %	250.493.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perempuan Ruang Lingkup Kabupaten Musi Banyuasin, Perempuan Rentan, Perempuan korban KDRT,	-	270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota															
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan</i>				100 Orang	250.493.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perempuan Ruang Lingkup Kabupaten Musi Banyuasin, Perempuan Rentan, Perempuan korban KDRT,		270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</i>	-			100 %	133.195.340,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perempuan Ruang Lingkup Kabupaten Musi Banyuasin, Perempuan Rentan, Perempuan Kepala Rumah Tangga	-	194.611.380,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik</i>				350 Orang	133.195.340,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perempuan Ruang Lingkup Kabupaten Musi Banyuasin, Perempuan Rentan, Perempuan Kepala Rumah Tangga		194.611.380,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4,	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	-				100 %	101.805.000,00					-	110.000.000,00		
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	-				100 %	101.805.000,00			-	Prioritas Daerah 5 : Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Kantor Lurah, Tempat Pelayan Publik, Anak Perempuan 15 Kecamatan	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Dokumen	101.805.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 5 : Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Kantor Lurah, Tempat Pelayan Publik, Anak Perempuan 15 Kecamatan		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5,	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-			70 % 100 %	657.561.600,00						-	755.521.000,00		

	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terbentuknya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	-			100 %	323.360.200,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Dipabel, Forum Anak, Lembaga terkait Perlindungan Anak, Guru tingkat SMP dan SMA	-	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	323.360.200,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Dipabel, Forum Anak, Lembaga terkait Perlindungan Anak, Guru tingkat SMP dan SMA		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan upaya dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	-			100 %	334.201.400,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Dipabel, Forum Anak, Lembaga terkait Perlindungan Anak, Guru tingkat SMP dan SMA, Dunia Usaha, OPD terkait	-	405.521.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		

											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	78.090.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Dipabel, Forum Anak, Lembaga terkait Perlindungan Anak, Guru tingkat SMP dan SMA, Dunia Usaha, OPD terkait		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Dokumen	135.590.300,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Dipabel, Forum Anak, Lembaga terkait Perlindungan Anak, Guru tingkat SMP dan SMA, Dunia Usaha, OPD terkait		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	120.521.100,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Dipabel, Forum Anak, Lembaga terkait Perlindungan Anak, Guru tingkat SMP dan SMA, Dunia Usaha, OPD terkait		120.521.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6,	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak</i>	-			100 %	1.050.671.096,00						-	1.150.000.000,00	

	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Persentase kekerasan terhadap anak	-			100 %	784.890.000,00			-	Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Anak Korban Kekerasan dan Pemerkosaan, Komisioner KPAD Musi Banyuasin	-	830.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				5 Orang	784.890.000,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Anak Korban Kekerasan dan Pemerkosaan, Komisioner KPAD Musi Banyuasin		830.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Menurunannya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk tindak Pidana, Perdagangan Orang dengan Fokus Pada Pencegahan, Penanganan Korban	-			100 %	265.781.096,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejaht eraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Dipabel, Forum Anak, Lembaga terkait Perlindungan Anak, Guru tingkat SMP dan SMA, Dunia Usaha, OPD terkait	-	320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	265.781.096,00	- Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat Prioritas Daerah 5 : Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak di 15 Kecamatan, Dipabel, Forum Anak, Lembaga terkait Perlindungan Anak, Guru tingkat SMP dan SMA, Dunia Usaha, OPD terkait		320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H							9.253.150.192,00							9.934.037.057,00	

BAB IV

PENUTUP

Sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPPA) mempunyai tugas dan fungsi sebagai motor penggerak urusan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi enam sub urusan yaitu *Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender Dan Anak, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak. Dan Juga Melaksanakan* Komitmen Dunia Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagai motor penggerak sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin bersama para driver lainnya yaitu Bappeda, Inspektorat dan BPKAD serta Para Perangkat Daerah terkait *telah berhasil* melaksanakan bagian dari Visi Bupati Musi Banyuasin dan melaksanakan misi Ke 7 “ Memberdayakan Perempuan dan melindungi anak serta Penyandang Disabilitas dengan indikator telah diraihnya 2 penghargaan Nasional dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Penghargaan *Kabupaten Layak Anak* sebagai indikator Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Penghargaan Nasional “*Anugerah Parahita Ekapraya* “ yaitu penghargaan di bidang Kesetaraan Gender yang dinilai telah mampu meletakkan Dasar - Dasar Pengarusutamaan Gender dengan memenuhi unsur 7 Prasyarat PUG yaitu *Komitmen, Kebijakan Dan Program Yang Responsif Gender, Adanya Kelembagaan PUG, Sumber Daya, SDM Dan Sarana Prasarana, Data Terpilah, TOOL Dan Jejaring* dimana capaiannya untuk di Sumatera Selatan sebagai satu satunya yang mampu meraih penghargaan tersebut. Di Tahun ke - 5 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin telah mampu mewujudkan Misi Bupati Musi Banyuasin yang ketujuh yaitu “ Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penyandang Disabilitas”.

Didalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin telah disusun bertitik

tolak dari perubahan arah dan pola Pembangunan Pusat, Propinsi ,maupun Pemkab Muba. Dengan dukungan seluruh Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Seluruh Gugus Tugas dan Pokja yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah maka tugas dan fungsi DPPPA sebagai motor penggerak sistem dapat optimal.

Untuk tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan 7 Program ,17 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

Semoga dengan adanya RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. di Kabupaten Musi Banyuasin.